

## **AKAR KELEMBAGAAN KORUPSI PELAYANAN PUBLIK: KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH DAERAH**

Yuris Rezha Kurniawan, Dr. Phil. Gabriel Lele, M.Si  
Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

### **INTISARI**

Korupsi di sektor publik hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang kompleks. Tak terkecuali korupsi pelayanan publik yang masih sering terjadi pada layanan perizinan yang diselenggarakan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada pemerintah daerah. Studi ini berusaha menganalisis peran keterbukaan informasi kelembagaan PTSP pada praktik-praktik korupsi layanan perizinan. Menggunakan metode analisis kualitatif dan pendekatan analisis isi, beberapa kasus korupsi layanan perizinan diidentifikasi serta dihubungkan dengan konsep keterbukaan informasi. Studi ini berbasis pada data sekunder berupa putusan pengadilan kasus korupsi, serta studi terdahulu yang membahas mengenai konsep keterbukaan informasi. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa lemahnya keterbukaan data, keterbukaan proses serta keterbukaan kebijakan/regulasi telah mempengaruhi terjadinya praktik korupsi pada layanan perizinan.

**Kata kunci:** korupsi, pelayanan publik, perizinan, keterbukaan informasi

### **INSTITUTIONAL ROOTS OF PUBLIC SERVICE CORRUPTION: DISCLOSURE OF INFORMATION IN THE ORGANIZATION OF ONE DOOR INTEGRATED SERVICES LOCAL GOVERNMENT**

#### **ABSTRACT**

Corruption in the public sector is still complex. Including public service corruption still occurs in local governments licensing services by One-Stop Integrated Service (PTSP). This study analyzes the role of PTSP institutional information disclosure on corrupt practices in licensing services using qualitative research with content analysis approaches. Cases of corruption in licensing services identify and are linked to the concept of information disclosure. The study is based on secondary data, especially on court decisions in corruption cases and previous information disclosure studies. The results of this study conclude that the weakness of data openness, process openness, and policy/regulation openness have influenced corrupt practices in licensing services.

**Keywords:** corruption, public service, licensing service, information disclosure